

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wewenang dan proses Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi yang jelas. Namun, menghadapi kendala karena keterbatasan SDM, dengan hanya dua petugas inti yang bertanggung jawab. Proses pelaksanaan sudah terstruktur sesuai prinsip pengolahan data statistik, tetapi tantangan terkait keterbatasan akses data tertentu tetap ada.
2. Koordinasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS Kabupaten Banyumas menunjukkan upaya yang baik dalam komunikasi, koordinasi, dan penyediaan layanan. Sistem komunikasi formal dan informal telah berjalan, tetapi koordinasi internal dan eksternal masih terbatas pada beberapa petugas inti. Kolaborasi dengan stakeholder eksternal seperti kampus sudah dimulai, tetapi perencanaan yang lebih matang diperlukan.
3. Mekanisme dan prosedur Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Kabupaten Banyumas telah menyediakan mekanisme dan prosedur layanan yang terstruktur, baik secara offline maupun online, guna mendukung aksesibilitas dan efisiensi. Prosedur ini merujuk pada aturan pusat yang memastikan

kepatuhan terhadap regulasi resmi. Namun, masih terdapat kendala terkait masyarakat yang belum paham mekanisme layanan.

4. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung dan penggunaan cctv, pengaduan publik melalui media sosial dan survei tahunan. Sanksi disiplin formal diterapkan untuk menjaga kinerja dan kedisiplinan pegawai, sementara penghargaan digunakan untuk memotivasi.
5. Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Banyumas Meskipun mekanisme pelayanan telah dirancang secara sistematis, sarana dan prasarana yang tersedia masih menghadapi keterbatasan, baik dalam hal relevansi fasilitas maupun kendala teknis perangkat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan difasilitasi melalui berbagai saluran, termasuk Survei Kebutuhan Data (SKD) dan inovasi seperti branding "PLAYON."
6. Lokasi Pelayanan PST BPS Kabupaten Banyumas memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat umum karena berada di pusat kota dan dekat dengan kampus. Selain pelayanan di kantor, diversifikasi lokasi seperti gerai di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pojok Statistik (POTIK) di kampus UNSOED dan Telkom University.
7. Bentuk Kelembagaan Layanan PST BPS Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari struktur vertikal BPS yang terintegrasi langsung dengan pusat. Kelembagaan ini memastikan keseragaman kebijakan dan layanan statistik

di seluruh tingkatan, meskipun kewenangan PST di tingkat daerah terbatas pada tugas-tugas yang ditentukan oleh pusat.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Kabupaten Banyumas:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman pengguna layanan adalah perlunya pembenahan dalam pembagian tugas dan pelatihan untuk pegawai serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
2. Keterbatasan personel dan kurangnya jadwal penjagaan yang terorganisir menunjukkan perlunya peningkatan jumlah pegawai dan penyusunan sistem kerja yang lebih terstruktur, serta pemahaman yang lebih baik tentang layanan PST agar koordinasi dapat berjalan dengan lebih efektif
3. Kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat adalah perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif dan peningkatan informasi layanan kepada masyarakat untuk memastikan mereka memahami prosedur yang berlaku.
4. Keterbatasan personil pengawas dan ketergantungan pada partisipasi aktif masyarakat menunjukkan perlunya penambahan petugas pengawas dan perluasan sosialisasi mengenai sistem pengaduan serta survei agar pengawasan dapat lebih optimal.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya sosialisasi pengaduan menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyediaan fasilitas yang sesuai standar pelayanan publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai saluran pengaduan yang tersedia.
6. Kekurangan dalam fasilitas yang sempit dan ketidakmerataan lokasi layanan mengimplikasikan perlunya penataan ruang yang lebih memadai dan memperluas jangkauan layanan ke lokasi-lokasi yang lebih jauh dari pusat kota agar aksesibilitas lebih merata.
7. Keterbatasan kewenangan di tingkat daerah dan ketergantungan pada kebijakan pusat menunjukkan perlunya peningkatan kemandirian di tingkat daerah agar lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat lokal dengan lebih cepat dan responsif.

